



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BACHYUNI DELIANSYAH
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 198052

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.410.000.000

1. Tanah Seluas 1228 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/61 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , WARISAN Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 40777 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 100095 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/99 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
7. Tanah Seluas 551 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 376.000.000

1. MOBIL, Honda HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 376.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 195.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 115.222.272

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 4.096.222.272

**III. HUTANG** Rp. ----



## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.096.222.272

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.